



Pejabat Hasil Lelang Disorot

Proyek Pelebaran Jalan Terindikasi Korupsi

PEJABAT hasil lelang yang dilantik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diduga banyak yang bermasalah. Kini giliran Kepala Dinas PU Bina Marga terindikasi merugikan negara sebesar Rp 1 miliar lebih dalam proyek pelebaran jalan untuk menunjang Mass Rapid Transit (MRT), tahun anggaran 2013. Saat itu, Yusmada menjabat sebagai kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PU DKI Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja barang jasa dan belanja modal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta, proyek pelebaran jalan yang merupakan tanggung jawab Yusmada terdapat kekurangan volume pekerjaan pelebaran jalan menunjang MRT tahap II sebesar Rp 1.459.111.853,19.

Total anggaran dalam proyek itu sebesar Rp 38.552.000.000. Sedangkan realisasi proyek mencapai Rp 30.191.108.053,45 atau 78,31 persen. Ketika itu, Yusmada Faizal merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan pelaksana pekerjaan yakni PT JKMP dengan jangka waktu pekerjaan 150 hari (24 Juni-20 November 2013).

Terhadap kontrak proyek itu, dilaksanakan tiga kali adendum. Namun hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh tim BPK bersama pihak yang mewakili PPTK, kontraktor, dan konsultan pengawas, tanggal 24 dan 26 September 2013, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan. Sedangkan 12 Desember 2013, pekerjaan telah selesai dan telah dibayar.

Diduga kuat kondisi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 89 ayat 4.

Menyoroti hal itu, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum

Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengaku sejak awal sudah menyoroti masalah seleksi dan promosi terbuka, atau kerap disebut lelang jabatan pejabat di

lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Terdapat dugaan kuat bahwa proses pelaksanaannya penuh kecurangan. "Saya bahkan pernah meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membatalkan pelantikan 4.676 pejabat dari eselon II sampai eselon IV di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, pada awal Januari lalu," ujar Uchok, kemarin (2/2).

Terkait munculnya informasi soal banyak pejabat yang diduga bermasalah dengan hukum, Uchok menilai, perlu dilaksanakan evaluasi. Sementara itu, Anggota Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menegaskan, pihaknya mendukung segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan di ibukota. Namun tetap harus mengutamakan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. (wok)

Proyek Pelebaran Jalan Penunjang MRT Tahap II



- Terjadi kelebihan pembayaran
- Indikasi kerugian negara sebesar Rp 1.459.111.853,19
- Disebabkan beberapa hal:
 - Kelalaian pengguna anggaran
 - Kelalaian PPK
 - Kelalaian pejabat pelaksana teknis
 - Kelalaian bendahara lalai
 - Kurang cermatnya panitia serah terima
 - Kurang cermatnya pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas

ANGGA GUMELARINDOPOS